

**MENANGKAL ISU AGAMA MENGGUNAKAN PERSPEKTIF
MODERASI BERAGAMA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI
POLITIK PADA PEMILIHAN UMUM 2019**

Arthur Rachman¹, Agam Zuama² Abdul Wahid³,

Perbandingan Madzhab dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung¹

Ilmu Politik, FISIP Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung^{2,3}

Email : arthurrachman93@gmail.com¹, agamzuama@gmail.com²,
aw771897@gmail.com³

ABSTRACT

This study aims to explain the politicization and religious issues used in the 2019 General Election as a form of political participation in relation to religious moderation. This research uses qualitative research methods, namely by collecting accurate data about elections that have been passed by the community. In this discussion it is explained how religion becomes a full force in nominating pairs of candidates in elections from religious groups. The theory used in this study uses the theory of political participation of Michael Rush and Philip Althoff. Identity politics is also very pronounced in elections because couples who run in 2019 have interests that carry the interests of religious groups in Indonesia. Similarly, various religious groups and organizations that adorn political life have led to the assumption that the 2019 election can generate good participation politically and look at the 2024 elections which will later have many candidates competing in the Presidential and Vice President exchanges. However, its relationship with religion is so close that it will cause visible effects felt by the community.

Keywords : Religion, Elections, Religious Moderation

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang politisasi dan isu agama yang digunakan dalam Pemilihan Umum 2019 sebagai bentuk partisipasi politik dalam kaitan moderasi beragama. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yakni dengan salah satu cara pengumpulan data yang akurat mengenai pemilu yang telah masyarakat lalui. Didalam bahasan ini dijelaskan bagaimana agama menjadi kekuatan yang penuh dalam mencalonkan pasangan calon dalam pemilu dari kelompok beragama. Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori partisipasi politik Michael Rush dan Philip Althoff. Politik identitas pun sangat terasa dalam pemilu karena pasangan yang maju dalam 2019 memiliki kepentingan yang membawa kepentingan kelompok beragama di Indonesia. Begitu pula dengan berbagai kelompok dan organisasi keagamaan yang menghiasi kehidupan politik menimbulkan anggapan bahwa pemilu 2019 dapat memunculkan partisipasi yang baik secara politik maupun melihat kepada pemilu 2024 yang nantinya akan banyak calon yang bersaing dalam bursa Capres dan Cawapres. Namun kaitanya dengan agama sangat erat sehingga akan menimbulkan efek yang terlihat dirasakan oleh masyarakat.

Kata Kunci : Agama, Pemilu, Moderasi Beragama

PENDAHULUAN

Beberapa waktu yang lalu banyak daripada peneliti dan juga ilmuwan politik yang mengamati tentang pemilu serentak 2019, sebelumnya banyak karya ilmiah yang telah diterbitkan seperti (Sumandoyo, 2018). Melihat peristiwa politik yang sudah terjadi di Indonesia seperti pemilu 2014, serta Pilkada Gubernur DKI Jakarta mewarnai segala geliat dan perilaku politik yang menggunakan agama sebagai alat jual untuk bisa mendongkrak elektabilitas pasangan calon, ataupun agama dijadikan sebagai alat untuk menyerang pasangan calon dalam kontestasi politik sehingga akan tercipta suasana yang sangat dramatisasi politik secara menyeluruh pada setiap kegiatan politik. Adanya partisipasi politik menjadi sangat tinggi sehingga membuat kontestasi politik semakin hangat dengan diwarnai beberapa isu yang melekat pada umat islam di Indonesia, dengan pengaruh budaya dan perilaku politiknya.

Berhubungan dengan beberapa gerakan sosial politik yang ikut mewarnai partisipasi aktif membuat seluruh kebijakan dan aktivitas politik tertuju kedalam sebuah alur narasi agama yang sangat kental. Dengan demikian memunculkan beberapa pemikiran perubahan Haluan politik masyarakat. Baik secara individual dan kelompok hampir dirasakan oleh sebagian elit politik di pemerintahan ataupun dengan pejabat daerah yang sedang menduduki jabatan strategis dalam pemerintahan, karena sebagian besar mengarah kepada partisipasi politik secara penuh dengan beberapa faktor yang tertuang didalam beberapa kebijakan dan implemementasi politik (A.A. Sahid Gatara, 2002). Agama menjadi alat yang mudah dalam menyerang elit politik dan melakukan politisasi agama terkhusus dalam pemilu serentak 2019, baik pemilihan legislatif yakni DPR Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, DPR RI, DPD di tingkat daerah dan termasuk pemilihan Presiden serta wakil Presiden.

Konteks moderasi beragama penting untuk dapat disuarakan melihat kepada tujuan yang *rahmatallil a'lam* yakni kebaikan untuk semua alam, toleransi beragama harus dapat dilihat secara detail mengenai konsep politik dalam isu agama yang terus dihadapi masyarakat menjelang tahapan proses Pemilihan Umum,

atau dengan perhelatan demokrasi yang menggunakan dramatisasi agama terstruktur sehingga titik temu menjadi sesuatu studi yang minim digali baik secara konsep moderasi yakni tawasuth (tengah-tengah) Adapun konsep lain I'tidal yang memiliki arti adil, serta tawazun yang memiliki arti berimbang dalam segala hal termasuk kedalam proses politik di Indonesia (Muhammad Ardhi Razaq, 2020).

Agama dewasa ini menjadi sesuatu yang khusus dalam perilaku masyarakat di Indonesia, karena sebagian daripada masyarakat di Indonesia sangat mudah dipengaruhi dalam konteks beragama. Agama juga dipandang sebagai sesuatu yang mudah menyakiti hati seseorang bagi pemeluknya, hal yang sangat sensitif dan terbilang sangat rawan dalam pemilihan, beberapa data pun memuat kemunculan politik identitas yang menjadi wujud kelompok beragama dalam melakukan aktivitas politik sehingga adanya penelitian ini bisa menjadi sarana evaluasi pemilu dalam konteks beragama serta kaitanya dengan segala bentuk-bentuk isu agama yang digunakan dalam pemilu serentak 2019 (Kementerian Agama, 2019).

METODE PENELITIAN

Penelitian singkat ini menggunakan analisis data sesuai model kualitatif yang mencakup penggambaran, penyajian serta ringkasan data yang dimuat untuk dijadikan hasil yang dapat serta disajikan dalam bentuk ilmiah supaya dapat dipahami dan bertanggung jawab atas Pendidikan dan karya ilmiah yang harus sesuai kaidahnya sehingga membuat keteraturan dalam konsep dan penelitian data. Diperkuat dengan sistem analisa data menggunakan konsep keteraturan dalam mengolah data menggunakan beberapa sumber terpercaya. (Sugiyono, 2020).

Pemahaman dan penulisan artikel ini menggunakan kajian atas cakupan penelitian terdahulu dengan melihat aspek sosiologis dan catatan yang menjadi penting sebagai penguat dalam beberapa pandangan terkait mengenai isu agama dalam pemilihan serentak 2019, hal ini digunakan karena dalam proses pembuatannya akan lebih mudah baik dengan kajian instusional dan melihat hasil kajian yang sudah dimuat, semua berdasarkan bentuk konkret penelitian dengan hasil yang tersaji dengan data dan penjelasan analisi terkait mengenai moderasi

agama dalam mengupayakan penurunan politisasi agama yang dilakukan pada pemilu 2019 terkhusus aktor politik dan orang yang mempunyai kepentingan dalam keinginan politik serta melihat bentuk konkret partisipasi politik yang ada di Indonesia.

HASIL DAN DISKUSI

A. Politik Partisipasi Agama Dalam Pemilu Serentak 2019

Beberapa bentuk yang menjelaskan agama secara penuh adalah suatu kepercayaan yang diyakini manusia sebagai wujud kepercayaan dengan tuhan nya karena agama dijadikan sebagai aturan seseorang dalam menjalani kehidupannya dengan menggunakan norma yang sudah ada dalam agama. Beberapa agama pun diyakini dan dipercayai di wilayah Indonesia yakni; Agama Islam, Agama Kristen, Agama Hindu, Agama Budha, Serta Agama Konghucu yang secara sah telah menjadi kepercayaan yang diakui oleh pemerintah Indonesia (Kementerian Agama, 2019).

Sehingga dalam melihat beberapa kasus politik hampir secara penuh didominasi oleh paham keagamaan yang sudah terperinci secara sistematis. Sehingga mempengaruhi partisipasi politik dalam pemilu (Al Qurtuby, 2018). Kata-kata yang berkaitan dengan agama menjadi sangat sering keluar daripada pembicaraan masyarakat maupun media di ranah media sosial dan perkumpulan warung kopi sehingga ada bentuk Politisasi Agama dalam setiap Langkah dan aktivitas politik, secara harfiahnya politisasi agama memiliki makna tingkat kepercayaan masyarakat menggunakan aktivitas politiknya dengan menggunakan agama, sehingga agama bukan menjadi bentuk religius dalam keyakinan melainkan menjadi bentuk politik yang digunakan dalam partisipasi politik, sehingga memunculkan bentuk politik praktis dalam ranah elit politik, mengaplikasikan semua nya dalam ranah politik dengan melibatkan beberapa kepentingan yang sudah diakumulasikan dengan beberapa elit politik di pemerintahan. Ditambah dengan beberapa media yang memuat narasi agama dalam politik menambah

elektabilitas dalam pemilihan legislatif hingga kepada pemilihan presiden (Muhammad Ardhi Razaq, 2020).

Aktivitas yang dilihat adalah bagaimana agama menjadi fokus permasalahan dalam pemilu dan pilkada di Indonesia untuk bisa melancarkan maksud dan tujuannya dalam pemilihan, adanya dukungan orang penting dalam agama menjadi permasalahan politik identitas yang dinilai menjadi ranah sensitif kerawanan pemilu di seluruh wilayah karena ada kelompok yang akan mengunggulkan calonnya yang satu dan senada dalam paham politiknya, dalam bentuk lain politik yang berhubungan langsung dengan simbol suatu agama bisa menjadi perpecahan di sebagai tempat karena menggunakan unsur objektif dalam melakukan aktivitas politik. Seperti Kopiah, peci atau sorban yang sering digunakan sekelompok agama dalam perilakunya, semua hampir memperlihatkan bentuk yang dapat dipahami dalam penilaian secara kelompok, hal inilah yang dapat memecah agama karena berhubungan dengan masyarakat Indonesia yang beragam agamanya.

Alih alih dalam melakukan kemenangan politik nya beberapa unsur agama menjadi politik Identitas yang sangat terlihat dengan jelas beberapa golongan saling Bersatu dan menjadi kajian menarik mengenai partai yang berlandaskan agama, karena dalam pengalaman Indonesia sendiri, pemisahan beberapa kelompok beragama menjadi hal yang sulit dalam penyama rataan hasil kepentingan yang nantinya akan berjuang secara sehat dalam kontestasi politik, menurut beberapa pandangan (Al Qurtuby, 2018). Mengenai pandangannya dalam politisasi agama menjadi kajian yang secara harfiah muncul dalam tiap pemikiran dan tubuh aktor politik tentang bagaimana bentuk advokasi masyarakat mengenai kepentingannya dalam politik dapat tertampung dengan mudah karena orang yang memiliki kekuasaan dalam kelompoknya dapat merealisasikan kepentingannya tersebut. Dalam bahasanya pun mengaitkan bentuk identitas politik dan politisasi agama sangat memiliki hubungan yang kentara dilihat oleh seluruh sehingga kekuatan sosial akan terbentuk dengan aktif dan simpatisan diseluruh wilayah di Indonesia.

Beberapa komunitas dalam kelompok masyarakat atau etnis akan mendukung terhadap politik identitas terjadi, karena faktor sosiologis budaya

menjadi syarat mutlak dalam mewujudkan politik yang diwarnai dengan bumbu agama didalamnya serta capaian yang diraih oleh beberapa kelompok beragama dalam mewujudkan aktivasi yang sudah dilakukan langsung dengan masyarakat, dengan arti bahwa kemampuan memahami sesuatu kelompok dapat ditampung melalui sebuah kekuasaan, baik dalam sektor legislatif maupun eksekutif dalam sebuah negara, karena kelompok yang hadir akan memberikan kontribusi yang konkret. Dalam bahasan Politisasi agama muncul daripada pemilu 2014, pemilihan gubernur DKI Jakarta pada tahun 2018, dan berdampak langsung dengan pilpres di tahun 2019 (Fernandes, 2019).

B. Penguatan Kontestasi Politik Menggunakan Pandangan Moderasi Beragama

Didalam pembahasan agama pasti ada struktur moral baik yang dibentuk sehingga mempengaruhi keterlibatan partisipasi politik masyarakat yang ada karena ada semangat tersendiri yang terbentuk dengan unsur lingkungan, sosial, organisasi dan pemahaman / ideologi secara sistematis (Miriam Budiarto, 2008). Beberapa peristiwa politik menggunakan unsur dan isu agama terutama narasi “muslim” yang sangat erat kaitannya dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, karena pergerakan politik kemarin melihat yang akan menjadi Presiden dengan beberapa pertimbangan calon yang ada di Legislatif juga mengacu pada pasangan calon presiden yang terpilih. Terutama banyak kalangan Kiai dan juga Ulama yang mendeklarasikan gurunya untuk bisa menjadi Wakil Presiden yang mendampingi Jokowi. Karena tidak bisa dipungkiri, pemilihan Wakil Presiden mendapatkan penguatan dari banyak golongan kelompok untuk bisa mendampingi Joko Widodo sebagai Presiden. Beberapa bursa kepala daerah pun mendapatkan banyak perhatian terkait dengan kinerja yang dinilai semakin baik tiap harinya, sehingga bursa dan partisipasi politik naik signifikan daripada sebelumnya, apalagi saat menjelang pemilihan, banyak yang mendekati Joko Widodo sebagai pendampingnya. Beberapa nama muncul seperti Muhaimin Iskandar yang menjadi Wakil Ketua MPRRI 2014-2019 yang sekaligus menjadi Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), nama yang kedua adalah Mahfud MD yakni Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi

yang dinilai menjadi sosok negarawan muslim yang mempunyai segudang prestasi dan bisa disebut sebagai santri yang menurut beberapa golongan pantas disandingkan dengan Jokowi yang mempunyai sifat Nasionalisme yang tinggi, yang ketiga ada nama Airlangga Hartanto yang sekaligus menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) yang mempunyai karakteristik pejabat sekaligus pengusaha muda yang telah menorehkan banyak prestasi dan kinerja yang baik sebagai anggota dewan dan Menteri pada saat itu dan secara deklarasi diusung oleh Himpunan Mubaligh se-Jawa Barat dengan deklarasi di muka umum.

Selanjutnya ada bentuk Politisasi Agama yang dilakukan oleh Ulama untuk mendukung Wakil Presiden mendampingi Jokowi yakni Tuan Guru Bajang (TGB) yang waktu 2019 masih menjabat sebagai Gubernur Nusa Tenggara Barat karena beberapa waktu itu TGB mendapatkan dukungan dari Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Kiai Said Aqil Siradj dengan beberapa penjelasa yakni sosok santri yang cocok untuk menjadi Wakil Presiden karena sebagai bentuk penyeimbang antara bentuk negarawan yang nasionalis dengan agamis (Antara TV Indonesia, 2018). Sehingga beberapa nama banyak disandingkan untuk merebutkan kursi nomer 2 di Indonesia. Dan yang terakhir adalah Kiai Ma'ruf Amin yang menjadi Wakil Ketua MUI sekaligus Rais Syuriah PBNU periode 2019, dengan segudang prestasi dan sosok kharismatik ulamanya yang akhirnya dipilih Jokowi untuk bisa mendampingi pada pemilihan Presiden 2019. Karena dari beberapa literatur yang menyebutkan bahwa Jokowi sangat memanfaatkan suara nya yang kebanyakan berasal dari Kaum Nahdliyin atau simpatisan NU, sehingga Jokowi mempunyai power yang kuat dalam pemerintahan karena pendukung NU di Indonesia yang menyentuh hampir diatas 100 Juta penduduk Indonesia.

Masih dengan isu agama yang melekat, salah satu penyaing kontestasi politik pada saat itu adalah Prabowo Subianto yang sekaligus beliau adalah Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya/ Gerindra, juga mendapat dukungan yang besar dari para Ulama yang berasal dari kaum FPI dan juga beberapa kelompok Ulama yang menamai diri dengan sebutan Ijtima Ulama. Penguatan suara Prabowo lebih banyak oleh pendukung DKI 1. Karena melihat pada Pemilihan Gubernur DKI

Jakarta 2018 banyak menyoroti masalah yang berhubungan dengan isu agama. Dengan adanya koalisi Partai Keadilan Sejahtera / PKS, yang berkoalisi dengan PAN dan Partai Demokrat maka beberapa nama pun muncul seperti Ketua Majelis Dewan Syuro PKS Habib Salim Segaf Al-Jufri yang memiliki latar belakang Ulama sekaligus habaib yang berasal dari keturunan Rasulullah SAW (Republika, 2018). Sehingga dapat disebut bahwa calon yang berasal dari pemuka agama sangat terlihat dengan jelas betapa memiliki kekuatan yang besar dalam menaikkan pamor dan elektabilitas Prabowo Subianto. Calon Wakil Presiden yang kedua adalah Ulama Abdul Somad, karena pada saat 2019 kedudukan Abdul Somad sangat terkenal dan dinilai memiliki Power yang signifikan. Karena kedua orang tersebut terpilih dalam rapat Ijtima Ulama yang dilaksanakan pada tanggal 27-29 April 2018. Sosok negarawan dan Religius dinilai menjadi poin lebih dari kedua orang yang nantinya menjadi pendamping Prabowo untuk maju dalam Pemilihan Presiden 2019. Semua pun melalui diskusi panjang dengan Habib Rizieq Shihab yang menjadi pemimpin FPI / Ketua GNPF.

Namun dari beberapa nama yang diusung akhirnya tidak berbuah dan berekspetasi secara tinggi, karena Ustadz Abdul Somad menolak dirinya untuk maju kedalam bursa Cawapres berpasangan dengan Prabowo Subianto, dan juga Prsiden PKS yang tidak mau maju karena ingin berfokus saja dalam mendukung pencalonan Prabowo. Akhirnya keinginan Prabowo ditambah dengan Ijtima Ulama akhirnya mendukung Sandiaga Uno untuk menjadi Cawapres, karena melihat kesuksesan beliau sebagai tokoh pengusaha serta memiliki jiwa entrepreneur muda mengantar keduanya untuk menjadi pasangan calon, disamping juga melihat dengan terpilihnya menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta membuat kekuatan yang dimiliki semakin bertambah. Semua skema kemenangan mengikuti seperti alur saat Pilgub DKI, baik secara partai yang berkoalisi, kemenangan calon, perekrutan suara dan kampanye yang hampir sama dengan Pencalonan Anies Baswedan pada tahun 2017 (Sumandoyo, 2018).

C. Moderasi Beragama Sebagai Peningkat Partisipasi Politik

Moderasi Beragama menjadi suatu hal yang sangat krusial dalam mengatasi permasalahan 2 kutub yang berbeda, sehingga daripada kepercayaan itu dapat dijaga dan menghasilkan kedamaian dalam konteks berbangsa serta bernegara (Kementerian Agama, 2019). lalu dengan maksud dengan Partisipasi Politik adalah bentuk keikutsertaan manusia atau orang yang memiliki kekuatan untuk bisa merubah dalam mempengaruhi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah atau bentuk keikutsertaan masyarakat dalam berbagai aktivitas politik secara keseluruhan untuk menentukan wakil calon yang akan menjadi pemimpin di masyarakat (Said Gatara, 2017). Namun dalam konteks sukarela dengan berdasarkan sifat sadar politik sebagai warga negara, baik dalam gabungannya kedalam partai politik, pendukung calon atau tim sukses calon ataupun masuknya kedalam organisasi masyarakat untuk bisa mempengaruhi kebijakan yang nantinya diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Terlihat Hierarki Tingkatan Partisipasi oleh Rush Althoff berikut.

Tingkatan Partisipasi Politik	Menempati jabatan politik atau administrasi
	Mencari jabatan politik atau administrasi
	keanggotaan aktif suatu organisasi politik
	Keanggotaan pasif suatu organisasi politik
	Keanggotaan aktif suatu organisasi semu
	Keanggotaan pasif suatu organisasi organisasi semu politik
	partisipasi dalam rapat
	partisipasi dalam diskusi politik informal umum dalam politik
	votting (pemberian suara)
	= apathi total

Sumber : (Althoff, 2018)

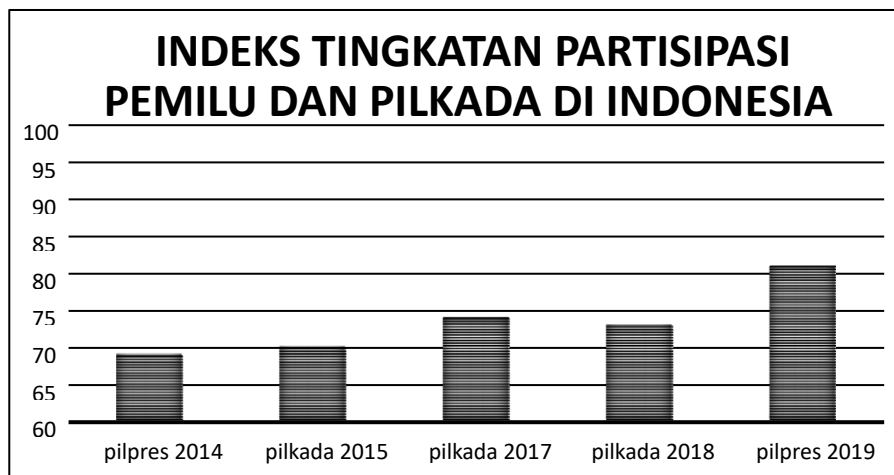
Konteks ilmu politik dapat melihat partisipasi politik serta peran agama dalam pemilu 2019 sangat memiliki dampak yang besar terhadap arah dan pergerakan politik menunjukan bahwa isu agama sangat digunakan dalam pencalonan Wakil Presiden, terutama agama islam yang dinilai sebagai mayoritas di Indonesia memberikan pengaruh yang sangat besar dalam kontestasi politik, bila melihat banyak nama yang masuk ke bursa Cawapres rata-rata memiliki latar belakang

sebagai tokoh agama sehingga sangat kental dengan peran ulama, dan ustadz, seperti contoh K.H. Ma'ruf Amin yang dijadikan Joko Widodo menjadi pasangan dan terpilih pada pemilu 2019. Disamping itu, peran ulama yang berasal dari pendukung Prabowo pun menjadi salah satu bentuk konkret betapa masyarakat Indonesia tertarik pada tokoh yang terkenal oleh mereka, meskipun ada beberapa efek yang ditimbulkan seperti kurangnya pengetahuan visi misi tujuan calon, meskipun mereka kenal dengan pasangan calon yang terpandang tetapi dari sisi inilah Pendidikan politik menjadi penting dalam kontestasi politik (Antara TV Indonesia, 2018).

Pembahasan tipologi partisipasi politik dapat terlihat jelas bahwa dalam pembahasan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden masuk kepada pengaruh partisipasi aktif karena melihat antusiasme pendukung sangat terlihat jelas karena beberapa pendukung membuat kubu yang menamakan diri mereka "Cebong" sebagai pendukung Joko Widodo dan sebutan "kampret" sebagai pendukung Prabowo. Anggapan ini sangat terlihat jelas hingga detik ini meskipun Prabowo sudah berdamai dan berkoalisi dengan Jokowi pada pemerintahan hari ini. Namun yang menjadi perhatian adalah pertentangan dari agama sendiri yang melihat peristiwa ini adalah bentuk pemecah belahan umat, karena kaitanya sudah berhubungan dengan kehidupan psikologis masyarakat Indonesia, seharusnya peristiwa seperti ini hanya panas ketika kontestasi sedang berlangsung namun kebiasaan politik yang dilakukan masyarakat adalah membawa nya dalam ranah yang tidak sesuai, sehingga dapat dikatakan Mudhorat nya lebih banyak atau dalam bahasan jaman sekarang adalah sikap bawa perasaan yang dilakukan masyarakat Indonesia. Seperti contoh ada satu kelompok yang saling bersama namun berbeda pilihan, mereka akan segera menjauhkan diri dan membentuk kelompok lain yang satu suara dengan mereka. Inilah contoh bahwa politik bila disalahgunakan akan membuahkan perpecahan oleh masyarakatnya sendiri.

Penjelasan lain yang masuk dalam pembahasan adalah keikut sertaan masyarakat baik secara Individu maupun Kolektif yang dalam hal ini berhubungan dengan partai politik secara bersama-sama menciptakan suasana politik yang terjadi

dalam kehidupan bermasyarakat bisa dirasakan baik sebelum pemilu maupun sesudah pemilu dilaksanakan, semua tingkatan dalam masyarakat pun ikut membicarakan apayang menjadi urgensi politik pada pemilu 2019. Beberapa indeks pemilih pun dibicarakan dan dibilang pada konteks pemilu 2019 sangat tinggi kepada survei yang naik setiap tahunnya dengan melihat data dan juga peristiwa yang sedang hangat dan berhubungan dengan isu agama (KPU RI, 2021).



Sumber : (KPU RI, 2021)

Hal berikut yang menjadi bekal dalam pemilihan 2024 nanti yang akan diadakan serentak sehingga secara kuantitatif meningkat dengan baik namun secara kualitas yang masih menjadi perhatian karena tingkat pemilih di Indonesia sangat berpengaruh dengan ketenaran saja tanpa melihat bagaimana calon yang diusung dalam melaksanakan kinerjanya sesuai dengan visi, misi serta tujuan.

Partisipasi juga diharapkan berjalan selaras dengan konteks agama yang sesuai dengan harapan politik, karena yang menjadi permasalahan adalah isu agama yang sifatnya sensitif dapat mempengaruhi masyarakat dalam bersikap maupun bertindak maka konteks moderasi beragama dibutuhkan semua kalangan dalam menyikapi hal praktis politik. Dalam hal pemilu 2019 memiliki keuntungan karena calon yang diusung bisa sesuai dengan hati rakyat karena berasal dari kaum ulama dan Ustadz, namun disisi lain perbedaan yang menimbulkan pecah belah yang

dinilai salah dalam menghadapi kehidupan masyarakat Indonesia yang sangat Pluralis dalam konteks agama.

Sehingga harus adanya peran masyarakat yang bijak dalam menghadapi pemilu yang hanya berlangsung satu kali dalam periode lima tahun, baik secara sikap dan perbuatan dapat sesuai dengan norma dan juga aspirasi masyarakat. Partisipasi politik terus harus dilanjutkan meskipun pelaksanaan pemilu sudah berakhir, hal tersebut yang menjadikan masyarakat sebagai alat control pemerintahan pada lima tahun kepemimpinan yang akan datang. Semua nya dalam berkontribusi bagi rakyat demi kesejahteraan bersama, sehingga agama bukan hanya dijadikan norma dalam bersikap namun norma sosial yang diterapkan dalam kehidupan politik, namun bila pemerintahan tidak sesuai maka tingkat partisipasi politik akan menjadi menurun seiring dengan berjalanya waktu dan dapat membahayakan sistem demokrasi yang ada di Negara Indonesia (Herdiansah, 2017).

KESIMPULAN

Partisipasi politik yang dilakukan masyarakat beragama sangat berkaitan dengan hubungan moderasi agama dalam kontestasi Pemilihan Umum memberikan dampak yang besar berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Preiden maupun Wakil Presiden, sehingga isu agama sangat kental dengan pelaksanaan pemilu.

Wacana Pemilu 2019 ini kita dapat melihat bahwa partisipasi politik sangat kental hubungannya dengan perilaku politisasi agama di Indonesia, melihat dengan berbagai sokongan calon berasal dari pemuka agama yang dalam pembicaraan ini kepentingan berasal dari kelompok beragama yakni agama islam dengan membawa narasi bahwa pemimpin yang berasal dari orang terpandang pada sebuah agama akan berdampak baik dan bisa dipercaya untuk kepemimpinan yang akan datang. Kelompok dan organisasi agama pun terlihat ikut serta dalam upaya politik di Indonesia. Seperti kelompok NU, Muhammadiyah yang saling bersinergi dalam menyukseskan kontestasi pemilu, ataupun dari kelompok pendukung lainnya yang

Arthur Rachman, Agam Zuama, Abdul Wahid, *Menangkal Isu Agama Menggunakan Perspektif Moderasi Beragama dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pada Pemilihan Umum 2019*, JSIPOL, Vol.2 Issue.4 No.2, October 31, 2023

menggunakan agama sebagai alat moderasi beragama dalam konteks kemenangan Pemilihan Umum 2019.

DAFTAR PUSTAKA

A.A. Sahid Gatara. (2002). *Ilmu Politik Memahami dan Menerapkan* (4th ed.). CV. Pustaka Setia.

Al Qurtuby, S. (2018). Sejarah Politik Politisasi Agama dan Dampaknya di Indonesia. *MAARIF*, 13(2), 43–54.

Althoff, M. R. P. (2018). *Pengantar Sosiologi Politik* (Kartini Kartono (ed.)). Rajawali.

Antara TV Indonesia. (2018). *Ketum PBNU dukung TGB jadi cawapres Jokowi*.

Fernandes, A. (2019). Politik Identitas Dalam Pemilu 2019: Proyeksi dan Efektivitas. *CSIS Election Series*, 1(1).

Herdiansah. (2017). Politik Identitas Dalam Kompetisi Pemilu di Indonesia Pasca 2014. *Jurnal Bawaslu*, 3(2), 169–183.

Kementerian Agama. (2019). *Moderasi Beragama, Badan Litbang dan Diklat kementerian Agama RI*.

KPU RI. (2021). *Data Partisipasi Politik Pada Pemilihan Umum 2019*. Kpu.Go.Id.

opendata.kpu.go.id/dataset/79a45ff6e-db20af17d-f11f4bf9d-e7f1c

Miriam Budiarjo. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. CV Prima Grafika.

Muhammad Ardhi Razaq. (2020). Partai Politik dan Moderasi Beragama Sebagai Pilar Demokrasi di Indonesia. *Resiprokal*, 2(1), 1–12.

Republika. (2018). *FUI: Prabowo-Sandi Sudah Sesuai Rekomendasi Ulama*.

<https://republika.co.id/berita/nasional/politik/18/08/10/pd94t9409-fui-prabowosandiagasure-sesuai-rekomendasi-ulama>

Said Gatara, D. S. (2017). *sosiologi politik* (E. Sugriarti (ed.)). CV. Pustaka Setia.

Arthur Rachman, Agam Zuama, Abdul Wahid, Menangkal Isu Agama Menggunakan Perspektif Moderasi Beragama dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pada Pemilihan Umum 2019, JSIPOL, Vol.2 Issue.4 No.2, October 31, 2023

Sumandoyo. (2018). *Pilpres 2019: Ulama Sana Versus Ulama Sini*. Tirto.Id.
<https://tirto.id/pilpres2019-ulama-sana-versus-ulama-sini-cRT4>